

PELATIHAN ADMINISTRASI BUMDESA KECAMATAN TOROH SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN PROFESIONALISME DAN DAYA SAING PENGELOLA DESA

**Khoirul An'am¹⁾, Wahyu Aji Wijaya²⁾, Agung Eko Nurcahyo³⁾, Intan Farida
Khasanah⁴⁾, Gabriel Gloria Ohee⁵⁾**

^{1),2),4),5)}Universitas Musamus Merauke,

³⁾Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang

Email : khoirulanam@unmus.ac.id¹⁾, wahyuajiwjv27@unmus.ac.id²⁾,
ekoagung111@gmail.com³⁾, intanfarida@unmus.ac.id⁴⁾, gebbyohee09@unmus.ac.id⁵⁾

***Abstract:** This community service activity was conducted in Toroh District with the aim of improving the capacity of Village-Owned Enterprise (BUMDes) administrators in professional, transparent, and accountable administrative management. The program focused on 16 BUMDes directors and 16 administrators who had previously faced challenges such as poor administrative understanding, weak record-keeping skills, and a lack of reporting standards. Through interactive training methods, hands-on practice, and ongoing mentoring, participants were equipped with modern administrative knowledge and skills tailored to the needs of village institutions. The results showed a significant increase in participant understanding, from a predominantly low level of understanding to a majority in the moderate to very high level of understanding after the training. Furthermore, participant satisfaction was very positive, with the majority expressing satisfaction with the relevance of the material, the quality of the facilitators, and the direct benefits that can be implemented in their respective BUMDes. This program has proven effective in addressing partner challenges while also providing tangible impacts in the form of increased accountability, professionalism, and institutional competitiveness of BUMDes at the village level..*

***Keywords:** BUMDes Administration, Capacity Building, Community Service.*

Abstrak: Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kecamatan Toroh dengan tujuan meningkatkan kapasitas pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pengelolaan administrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. Program difokuskan pada 16 direktur BUMDes beserta 16 pengurus yang selama ini menghadapi kendala rendahnya pemahaman administrasi, lemahnya keterampilan pencatatan, dan kurangnya standar pelaporan. Melalui metode pelatihan interaktif, praktik langsung, dan pendampingan berkelanjutan, peserta dibekali dengan pengetahuan serta keterampilan administrasi modern yang sesuai dengan kebutuhan kelembagaan desa. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta, yang awalnya

didominasi kategori kurang paham, berubah menjadi mayoritas berada pada kategori cukup paham dan sangat paham setelah pelatihan. Selain itu, respon kepuasan peserta sangat positif, dengan mayoritas menyatakan puas atas relevansi materi, kualitas fasilitator, serta manfaat langsung yang dapat diimplementasikan di BUMDes masing-masing. Program ini terbukti efektif dalam menjawab permasalahan mitra, sekaligus memberikan dampak nyata berupa peningkatan akuntabilitas, profesionalisme, dan daya saing kelembagaan BUMDes di tingkat desa.

Kata Kunci: Administrasi BUMDes, Peningkatan Kapasitas, Pengabdian Masyarakat.

PENDAHULUAN

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan instrumen strategis dalam memperkuat kemandirian ekonomi desa melalui pengelolaan potensi lokal secara profesional. Keberadaan BUMDes di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memberikan kewenangan desa untuk membentuk badan usaha sebagai motor penggerak ekonomi berbasis partisipasi masyarakat. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa banyak BUMDes masih menghadapi berbagai persoalan, terutama pada aspek tata kelola administrasi dan profesionalisme pengelola. Ketidakmampuan dalam menyusun laporan keuangan, minimnya pemahaman terkait standar administrasi, serta rendahnya kualitas dokumentasi sering menjadi hambatan yang mengurangi daya saing BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa (Agunggunanto et al., 2016).

Di Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, terdapat sejumlah BUMDes yang potensial namun masih menghadapi kendala serupa. Berdasarkan hasil observasi awal, sebagian besar direktur dan pengurus BUMDes di wilayah ini belum memiliki standar administrasi yang seragam. Misalnya, pencatatan laporan keuangan belum dilakukan secara terstruktur, penyimpanan arsip masih manual dan tidak terdokumentasi dengan baik, serta penyusunan laporan pertanggungjawaban masih bersifat insidental dan belum mengikuti pedoman baku. Permasalahan ini berimplikasi pada rendahnya akuntabilitas, kurangnya transparansi, serta lemahnya daya tawar BUMDes di hadapan masyarakat maupun mitra eksternal (Susanti & Pratiwi, 2020). Hal ini membuktikan bahwa tanpa perbaikan kapasitas administrasi, BUMDes akan sulit bersaing dan berkelanjutan dalam jangka panjang.

Selain itu, profesionalisme pengelola menjadi isu penting dalam penguatan kelembagaan BUMDes. Rendahnya kompetensi administrasi menyebabkan direktur maupun pengurus sering kali kurang mampu menyusun strategi usaha berbasis data, sehingga perencanaan

program tidak tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan temuan Purwana et al. (2017) yang menunjukkan bahwa lemahnya administrasi BUMDes berdampak langsung pada keterbatasan inovasi usaha dan rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, permasalahan mitra dalam konteks pengabdian ini dapat dirumuskan menjadi tiga hal pokok: (1) lemahnya pencatatan administrasi dan pelaporan, (2) ketiadaan standar baku administrasi yang diterapkan seragam di seluruh BUMDes Kecamatan Toroh, serta (3) rendahnya profesionalisme pengelola yang mengurangi daya saing BUMDes.

Jika ditinjau dari perspektif akademik, terdapat sejumlah penelitian terdahulu mengenai BUMDes yang relevan untuk dianalisis sebagai pembanding. Agunggunanto et al. (2016) menegaskan peran BUMDes dalam mendorong pemberdayaan masyarakat desa melalui pengelolaan potensi lokal, namun penelitian tersebut belum menyoroti aspek administrasi secara spesifik. Penelitian ini lebih berfokus pada kontribusi BUMDes terhadap pembangunan ekonomi desa, sehingga tidak secara mendalam membahas masalah kapasitas tata kelola administrasi. Dengan demikian, terdapat kesenjangan penelitian terkait implementasi penguatan administrasi sebagai basis keberhasilan BUMDes.

Selanjutnya, Purwana et al. (2017) meneliti peran BUMDes dalam mengembangkan perekonomian desa dengan menekankan pada manajemen usaha. Hasilnya menunjukkan bahwa tata kelola administrasi yang lemah menghambat perkembangan BUMDes, namun penelitian ini lebih banyak menyoroti dimensi kewirausahaan dan strategi bisnis. Hal ini menyisakan ruang untuk kajian lebih detail mengenai peran pelatihan administrasi dalam membangun profesionalisme pengelola. Dengan demikian, gap yang muncul adalah kurangnya penelitian berbasis praktik pelatihan administrasi yang terintegrasi dengan upaya peningkatan daya saing BUMDes.

Penelitian Rahayu dan Putra (2020) juga mengkaji tentang penguatan kapasitas manajerial BUMDes sebagai strategi peningkatan ekonomi desa. Mereka menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam aspek kepemimpinan dan manajemen, untuk mendukung kinerja BUMDes. Namun, penelitian ini belum secara rinci membahas standar administrasi dan implementasi pelatihan teknis administrasi yang dapat mendukung profesionalisme pengelola. Dengan demikian, pengabdian yang akan dilakukan di Kecamatan Toroh dapat mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan fokus pada aspek administrasi praktis.

Selain itu, Nuryanti dan Swastika (2021) menguraikan strategi BUMDes dalam

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dengan menekankan integrasi program pemberdayaan dan pengembangan usaha. Meskipun relevan, penelitian ini cenderung membahas strategi makro tanpa membedah secara rinci bagaimana administrasi dapat menjadi kunci bagi efektivitas strategi tersebut. Hal ini kembali menegaskan adanya kebutuhan akan intervensi konkret berupa pelatihan administrasi untuk memperkuat profesionalisme pengelola BUMDes.

Arifin dan Hastuti (2021) menyoroti digitalisasi BUMDes sebagai salah satu strategi untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan usaha. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi digital dapat mempercepat pencatatan administrasi dan meningkatkan transparansi. Namun, kendala yang muncul adalah rendahnya literasi administrasi dasar dari pengurus, sehingga penerapan digitalisasi sulit dijalankan secara optimal. Oleh karena itu, pelatihan administrasi dasar merupakan fondasi penting sebelum digitalisasi diterapkan. Inilah yang membedakan penelitian terdahulu dengan pengabdian ini, di mana fokusnya adalah membangun profesionalisme administrasi sebagai pijakan awal peningkatan daya saing BUMDes.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat jelas adanya gap antara penelitian terdahulu dan kebutuhan nyata di lapangan. Sebagian besar penelitian lebih menyoroti peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat, strategi kewirausahaan, dan pemanfaatan teknologi, tetapi belum banyak yang membahas secara detail bagaimana pelatihan administrasi dapat memperkuat profesionalisme pengelola. Padahal, administrasi merupakan fondasi bagi keberlanjutan usaha, transparansi, serta daya saing lembaga. Pengabdian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan intervensi langsung berupa pelatihan administrasi kepada para direktur dan pengurus BUMDes di Kecamatan Toroh.

Adapun tujuan utama dari kegiatan pengabdian ini adalah meningkatkan kemampuan direktur dan pengurus BUMDes dalam aspek administrasi, baik dari segi pencatatan, penyusunan laporan, maupun pengelolaan arsip. Selain itu, pengabdian ini juga bertujuan untuk menstandarkan sistem administrasi yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh BUMDes Kecamatan Toroh, sehingga menghasilkan tata kelola yang lebih profesional dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan lain adalah mendorong pengelola BUMDes agar memiliki kompetensi administrasi yang memadai untuk bersaing dengan lembaga ekonomi lainnya, baik di tingkat lokal maupun regional.

a. Manfaat dari kegiatan ini diharapkan dapat dirasakan secara langsung oleh mitra, yaitu BUMDes di Kecamatan Toroh. Pertama, dengan adanya pelatihan administrasi, para pengurus akan lebih profesional dalam mengelola dokumen dan laporan, sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Kedua, standarisasi administrasi akan mempermudah proses evaluasi dan pengawasan oleh pemerintah desa maupun masyarakat, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan publik. Ketiga, peningkatan daya saing BUMDes melalui profesionalisme administrasi akan berdampak positif pada perkembangan usaha, kontribusi terhadap pendapatan desa, serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dengan demikian, pengabdian ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek berupa peningkatan keterampilan, tetapi juga manfaat jangka panjang berupa keberlanjutan kelembagaan BUMDes.

KAJIAN LITERATUR

Teori kontinjensi menegaskan bahwa tidak ada satu pendekatan manajerial yang dapat berlaku universal dalam setiap organisasi, termasuk BUMDes. Dalam konteks pengelolaan administrasi, pendekatan manajemen strategis perlu disesuaikan dengan karakteristik organisasi desa dan lingkungannya. Penelitian Sriyono, Nugroho, Soeprpto, dan Sirait (2022) menunjukkan bahwa sebagian besar pengelola BUMDes di Indonesia belum konsisten menerapkan teknik akuntansi manajemen strategis, sehingga berdampak pada kurang optimalnya peran BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sriyono et al., 2022).

Namun, persoalan administratif tidak hanya berhenti pada aspek teknis, melainkan juga menyangkut faktor kelembagaan. Kusmulyono, Dhewanto, dan Famiola (2021) menegaskan bahwa rendahnya komitmen kepala desa dan direktur BUMDes, ditambah dengan minimnya motivasi dan pengetahuan bisnis pengurus, menjadi penghambat utama BUMDes dalam berkontribusi pada resiliensi desa (Kusmulyono et al., 2021). Hal ini memperlihatkan bahwa administrasi yang lemah sering kali berakar pada kepemimpinan dan tata kelola yang kurang profesional.

Lebih lanjut, teori manajemen klasik yang menekankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian juga relevan digunakan dalam menilai efektivitas BUMDes. Puspita, Nurbayanti, dan Novianti (2022) menemukan bahwa kegagalan BUMDes banyak disebabkan oleh pemilihan ide usaha yang serampangan, keputusan yang tidak efektif, serta keterbatasan dalam mengakses sumber daya desa (Puspita et al., 2022).

Teori ini menegaskan perlunya sistem administrasi yang jelas, terukur, dan adaptif terhadap kondisi lokal.

Dalam kerangka teori kewirausahaan pedesaan, BUMDes dipandang sebagai wahana penciptaan peluang usaha baru berbasis potensi lokal. Kania, Anggadwita, dan Alamanda (2021) menyebutkan bahwa keberhasilan BUMDes dalam mendorong kewirausahaan desa sangat dipengaruhi oleh proses pemberdayaan, pembangunan kapasitas, serta dukungan dari berbagai pemangku kepentingan (Kania et al., 2021). Teori ini sejalan dengan konsep *collaborative governance*, di mana administrasi desa tidak bisa berdiri sendiri tanpa sinergi antaraktor.

Di sisi lain, literatur tentang administrasi publik menekankan peran tata kelola berbasis transparansi dan akuntabilitas. Penelitian Permadi (2023) menunjukkan bahwa penggunaan aplikasi digital dalam pengelolaan administrasi BUMDes dapat meningkatkan keteraturan laporan dan memudahkan akuntabilitas kepada pemerintah desa (Permadi, 2023). Hal ini membuktikan bahwa teori *e-governance* juga mulai relevan diterapkan dalam konteks pedesaan.

Teori pembangunan ekonomi lokal juga memberikan dasar analitis penting. Sreirejeki (2018) menekankan bahwa BUMDes tidak hanya bertindak sebagai mediator dana pemerintah, tetapi juga sebagai fasilitator yang dapat mendorong aktivitas ekonomi desa melalui penciptaan nilai tambah (Sreirejeki, 2018). Teori ini menegaskan bahwa administrasi yang tertib merupakan prasyarat agar BUMDes mampu menjalankan peran sebagai agen pembangunan ekonomi.

Selain itu, teori pembangunan berkelanjutan menekankan bahwa BUMDes harus mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan. Febrina, Marta, Amin, dan Hadi (2024) menyoroti bahwa strategi BUMDes harus mengedepankan prinsip profesional, partisipatif, serta berorientasi pada keberlanjutan sumber daya lokal (Febrina et al., 2024). Teori ini relevan untuk mendasari praktik administrasi yang tidak hanya fokus pada profit, tetapi juga kesejahteraan jangka panjang.

Kapabilitas pemerintah daerah juga penting dalam mendukung tata kelola BUMDes. Rahmatunnisa, Suwaryo, dan Yuningsih (2023) menegaskan bahwa kemampuan legislatif dan adaptif pemerintah daerah sangat menentukan keberlanjutan investasi dalam BUMDes, meskipun sering kali masih terbentur rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola BUMDes (Rahmatunnisa et al., 2023).

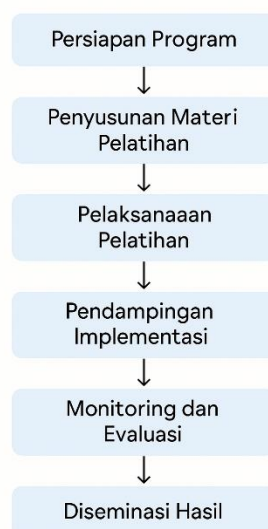
Dari perspektif andragogi, Rodiyah (2019) menekankan bahwa pendampingan administrasi berbasis pembelajaran orang dewasa lebih efektif dalam membantu pengelola BUMDes meningkatkan kapasitas, dibandingkan pendekatan instruktif tradisional (Rodiyah, 2019). Teori ini menegaskan pentingnya strategi pelatihan yang partisipatif dan reflektif dalam konteks pengabdian masyarakat.

Aritenang (2021) menambahkan bahwa modal sosial merupakan faktor krusial dalam pengelolaan BUMDes, terutama dalam mendorong partisipasi komunitas dan memperkuat tata kelola kolaboratif (Aritenang, 2021). Perspektif ini melengkapi teori administrasi dengan menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola BUMDes tidak hanya diukur dari aspek administratif, tetapi juga dari kualitas jaringan sosial yang menopangnya.

Implementasi Program Pengabdian

Pelaksanaan program pengabdian dengan tema *Pelatihan Administrasi Bumdesa Kecamatan Toroh sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Daya Saing Pengelola Desa* dirancang dengan pendekatan partisipatif, edukatif, dan aplikatif. Metode ini dipilih karena sesuai dengan karakteristik mitra, yakni para direktur dan pengurus BUMDes yang memerlukan peningkatan kapasitas teknis sekaligus penguatan komitmen dalam pengelolaan administrasi. Implementasi program dilaksanakan melalui beberapa tahapan terintegrasi yang saling melengkapi, sehingga hasil yang diperoleh tidak hanya berhenti pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada perubahan perilaku dan tata kelola organisasi.

Tahapan Implementasi Program Pengabdian



Tahap pertama adalah **persiapan program**. Pada tahap ini, tim pengabdian melakukan koordinasi dengan pemerintah Kecamatan Toroh dan para pengurus BUMDes untuk menyepakati jadwal, lokasi, serta bentuk kegiatan. Persiapan ini juga mencakup pemetaan kebutuhan (needs assessment) melalui wawancara singkat dan kuesioner kepada para pengelola BUMDes. Hasil pemetaan ini menunjukkan adanya variasi pemahaman tentang administrasi, mulai dari pencatatan keuangan, penyusunan laporan tahunan, hingga pengarsipan dokumen. Data awal tersebut menjadi dasar bagi tim dalam menyusun modul pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan lapangan.

Tahap kedua adalah **penyusunan materi pelatihan**. Modul pelatihan dibagi dalam tiga komponen utama: (1) pengenalan prinsip administrasi modern, (2) praktik pencatatan dan pelaporan keuangan, dan (3) tata kelola dokumen dan arsip BUMDes. Setiap modul disusun dengan pendekatan aplikatif menggunakan contoh nyata dari administrasi BUMDes di Kecamatan Toroh. Dengan cara ini, peserta dapat lebih mudah memahami materi karena langsung berkaitan dengan konteks mereka sehari-hari.

Tahap ketiga adalah **pelaksanaan pelatihan**. Kegiatan pelatihan dilaksanakan dalam bentuk workshop tatap muka dengan metode andragogi, yakni pembelajaran berbasis orang dewasa yang menekankan pada pengalaman, diskusi, dan praktik langsung. Sesi pertama diawali dengan paparan konsep dasar administrasi dan pentingnya profesionalisme dalam tata kelola BUMDes. Selanjutnya, peserta dibagi dalam kelompok kecil untuk melakukan simulasi pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan sederhana, dan penataan arsip. Proses ini difasilitasi oleh tim pengabdian yang bertindak sebagai mentor, sehingga peserta dapat langsung mengajukan pertanyaan dan memperoleh bimbingan teknis sesuai kebutuhan.

Tahap keempat adalah **pendampingan implementasi**. Setelah workshop selesai, tim pengabdian tidak langsung menghentikan kegiatan, tetapi melanjutkannya dengan pendampingan di lapangan. Pendampingan dilakukan secara periodik di masing-masing BUMDes dengan tujuan memantau penerapan administrasi baru yang telah dipelajari. Pada tahap ini, peserta didorong untuk mengadaptasi sistem administrasi ke dalam organisasi mereka, misalnya dengan membuat format laporan bulanan yang seragam, mengatur mekanisme tanda tangan berjenjang, dan menerapkan sistem pengarsipan berbasis digital maupun manual.

Tahap kelima adalah **monitoring dan evaluasi**. Untuk mengetahui efektivitas pelatihan, tim pengabdian menggunakan instrumen pre-test dan post-test yang mengukur pemahaman

peserta terhadap materi administrasi. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan pada keterampilan administrasi peserta, khususnya dalam penyusunan laporan keuangan dan penataan dokumen. Selain itu, dilakukan juga evaluasi berbasis observasi terhadap praktik administrasi di masing-masing BUMDes untuk menilai sejauh mana hasil pelatihan benar-benar diterapkan. Monitoring ini berfungsi sebagai mekanisme koreksi sekaligus memberikan umpan balik bagi peserta agar terus meningkatkan kapasitas mereka.

Tahap terakhir adalah **diseminasi hasil**. Tim pengabdian menyusun laporan akhir yang berisi capaian kegiatan, tingkat keberhasilan, serta rekomendasi penguatan kelembagaan BUMDes ke depan. Laporan ini tidak hanya disampaikan kepada peserta, tetapi juga kepada pemerintah Kecamatan Toroh dan dinas terkait agar dapat digunakan sebagai dasar kebijakan pembinaan BUMDes. Selain itu, diseminasi dilakukan melalui forum diskusi antar-BUMDes di Kecamatan Toroh, sehingga hasil pengabdian dapat menginspirasi desa-desa lain untuk menerapkan praktik administrasi yang serupa.

Dengan implementasi program yang sistematis tersebut, diharapkan terjadi peningkatan kapasitas administrasi yang signifikan pada para direktur dan pengurus BUMDes. Program ini tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan organisasi desa. Dampak jangka panjang yang diharapkan adalah terbentuknya tata kelola administrasi BUMDes yang seragam, transparan, dan akuntabel, sehingga meningkatkan daya saing BUMDes sebagai motor penggerak ekonomi desa di Kecamatan Toroh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian dengan judul *Pelatihan Administrasi Bumdesa Kecamatan Toroh sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Daya Saing Pengelola Desa* pada dasarnya diarahkan untuk merespons persoalan mendasar yang dihadapi mitra, yakni lemahnya tata kelola administrasi BUMDes yang menyebabkan rendahnya tingkat akuntabilitas, transparansi, dan profesionalisme pengurus. Dalam observasi awal, ditemukan bahwa sebagian besar pengelola masih melakukan pencatatan transaksi secara manual tanpa standar baku, sehingga menimbulkan inkonsistensi laporan keuangan antar-BUMDes di Kecamatan Toroh. Kondisi ini bukan saja menimbulkan keraguan dari masyarakat terhadap kredibilitas lembaga, tetapi juga mengurangi potensi BUMDes dalam menarik dukungan dari pihak eksternal seperti lembaga keuangan, mitra usaha, maupun pemerintah daerah. Dengan merancang program pelatihan administrasi yang berorientasi pada praktik langsung, kegiatan

pengabdian ini berhasil mengisi kesenjangan kompetensi yang selama ini menjadi akar permasalahan. Para peserta tidak hanya memperoleh wawasan konseptual mengenai pentingnya administrasi modern, tetapi juga dilatih menyusun laporan keuangan yang rapi, mengelola arsip, serta mendesain format administrasi standar yang bisa diadopsi secara kolektif di seluruh BUMDes Kecamatan Toroh. Keberhasilan ini menunjukkan adanya kesesuaian antara tujuan pengabdian dengan capaian di lapangan, yakni meningkatkan keterampilan teknis sekaligus membangun budaya profesionalisme di tubuh BUMDes.

Lebih jauh lagi, analisis pelaksanaan kegiatan ini memperlihatkan bahwa metode workshop berbasis andragogi yang digunakan mampu menjawab kebutuhan peserta yang mayoritas merupakan praktisi di lapangan dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman yang beragam. Dengan memanfaatkan pendekatan partisipatif, setiap peserta diberikan kesempatan untuk berbagi pengalaman terkait kendala administrasi di BUMDes masing-masing. Diskusi ini melahirkan sebuah ruang belajar kolektif, di mana permasalahan individual dapat dicarikan solusi bersama melalui praktik pencatatan, pelaporan, dan pengarsipan yang ditunjukkan secara langsung oleh fasilitator. Model pembelajaran semacam ini membuat peserta merasa dilibatkan, bukan hanya sebagai objek pelatihan, melainkan sebagai aktor penting dalam merumuskan standar administrasi yang sesuai dengan konteks lokal mereka. Selain itu, adanya sesi simulasi penyusunan laporan keuangan dan pengarsipan dokumen membuat peserta tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan pengetahuan tersebut secara konkret. Dampaknya terlihat dalam hasil evaluasi pasca pelatihan yang menunjukkan peningkatan signifikan dalam keterampilan administrasi. Peningkatan ini tidak hanya terbukti secara kuantitatif melalui hasil tes, tetapi juga secara kualitatif berdasarkan pengakuan peserta yang menyatakan lebih percaya diri dalam menyusun laporan BUMDes. Dengan demikian, metode yang diterapkan dalam kegiatan pengabdian ini terbukti efektif dalam mengatasi hambatan mitra, sekaligus memastikan tujuan peningkatan profesionalisme dapat tercapai secara nyata.

Selanjutnya, keberhasilan pengabdian ini juga dapat dilihat dari dampak jangka menengah yang mulai tampak dalam periode pendampingan setelah pelatihan. Beberapa BUMDes di Kecamatan Toroh yang sebelumnya tidak memiliki sistem administrasi baku kini sudah mulai menerapkan format laporan bulanan dan sistem pengarsipan sederhana berbasis digital. Hal ini merupakan indikasi awal bahwa pelatihan yang diberikan bukan hanya menghasilkan pemahaman sesaat, melainkan telah memicu transformasi kelembagaan menuju

tata kelola yang lebih transparan dan akuntabel. Perubahan ini tentu berimplikasi positif terhadap meningkatnya kepercayaan masyarakat desa terhadap pengurus BUMDes, sekaligus memperkuat posisi BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa yang profesional. Dalam perspektif jangka panjang, konsistensi penerapan sistem administrasi yang lebih baik akan mendorong peningkatan daya saing BUMDes, baik dalam mengelola unit usaha desa maupun dalam menjalin kemitraan dengan pihak eksternal. Dengan demikian, analisis pelaksanaan ini menunjukkan bahwa kegiatan pengabdian sejalan dengan tujuan awal, yaitu meningkatkan profesionalisme dan daya saing pengelola BUMDes, serta secara nyata mampu mengatasi persoalan mitra terkait lemahnya tata kelola administrasi. Keberhasilan tersebut juga menjadi bukti bahwa program pengabdian berbasis pelatihan dan pendampingan adalah strategi efektif untuk memperkuat kapasitas kelembagaan desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi lokal.



Berdasarkan data yang diperoleh sebelum pelaksanaan pelatihan administrasi, mayoritas peserta berada pada kategori *kurang paham administrasi* dengan jumlah 16 orang dari total 32 peserta. Hal ini menunjukkan bahwa lebih dari separuh peserta masih membutuhkan pemahaman mendasar mengenai tata kelola administrasi BUMDes. Sementara itu, 8 peserta lainnya termasuk dalam kategori *tidak paham administrasi sama sekali*, yang mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan dalam kapasitas awal pengurus BUMDes di Kecamatan Toroh.

Di sisi lain, hanya 6 peserta yang masuk kategori *cukup paham administrasi*, dan hanya 2 orang yang dinilai *sangat paham administrasi*. Proporsi ini menunjukkan bahwa tingkat

literasi administrasi di kalangan pengurus BUMDes masih relatif rendah. Grafik pie memperlihatkan distribusi pengetahuan yang timpang, dengan dominasi kelompok yang membutuhkan peningkatan kapasitas. Kondisi ini memperkuat urgensi program pelatihan sebagai sarana transfer pengetahuan sekaligus penyeragaman standar administrasi.

Temuan ini memberikan gambaran jelas bahwa pelatihan administrasi bukan sekadar kebutuhan, melainkan prioritas mendesak untuk meningkatkan profesionalisme BUMDes. Dengan adanya mayoritas peserta yang berangkat dari tingkat pemahaman rendah, maka metode pelatihan yang digunakan harus bersifat aplikatif dan mudah dipahami. Data ini juga dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi efektivitas pelatihan, dengan membandingkan tingkat pemahaman peserta setelah program selesai.

Analisis Dampak dan Respon Kepuasan Peserta

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Kecamatan Toroh dengan fokus pada *Pelatihan Administrasi Bumdesa sebagai Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Daya Saing Pengelola Desa* membawa dampak yang signifikan terhadap peningkatan kapasitas peserta, khususnya para direktur dan pengurus BUMDes. Hasil survei awal menunjukkan bahwa sebagian besar peserta berada dalam kategori *kurang paham* atau bahkan *tidak paham administrasi*. Dari 32 peserta, hanya 2 orang yang menyatakan sangat paham, sementara 16 orang mengaku kurang paham, dan 8 orang tidak memiliki pemahaman sama sekali. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan besar dalam kemampuan administrasi yang dapat menjadi penghambat serius bagi kinerja kelembagaan BUMDes. Namun setelah program pengabdian ini dijalankan, evaluasi pasca pelatihan terhadap 20 peserta yang dipilih sebagai sampel uji dampak memperlihatkan perubahan yang sangat berarti. Sebagian besar peserta menunjukkan peningkatan pemahaman, dengan mayoritas beralih ke kategori *cukup paham* hingga *sangat paham administrasi*. Hal ini menandakan bahwa pelatihan tidak hanya berhasil meningkatkan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan keterampilan praktis yang relevan dengan kebutuhan mitra.

Dampak yang dirasakan peserta dapat dilihat dari beberapa dimensi. Pertama, dimensi **pengetahuan**. Peserta melaporkan bahwa setelah mengikuti pelatihan, mereka lebih memahami prinsip-prinsip dasar administrasi, seperti pencatatan transaksi keuangan, penyusunan laporan, serta pengarsipan dokumen yang sistematis. Pengetahuan ini bukan hanya sebatas teori, melainkan juga aplikatif karena mereka dilatih melalui simulasi nyata

menggunakan data dan dokumen BUMDes masing-masing. Kedua, dimensi **keterampilan**. Sebelum pelatihan, sebagian besar pengurus masih menggunakan metode pencatatan sederhana di buku tulis tanpa standar format. Pasca pelatihan, 18 dari 20 peserta menyatakan telah mampu menggunakan format laporan baku yang diajarkan, baik dalam bentuk cetak maupun digital. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga melatih keterampilan praktis yang bisa langsung diterapkan. Ketiga, dimensi **sikap dan profesionalisme**. Sebagian besar peserta mengaku lebih percaya diri dalam menjalankan peran mereka sebagai pengelola BUMDes setelah memperoleh pemahaman administrasi yang lebih baik. Sikap profesional mulai tumbuh, ditunjukkan dengan adanya kesadaran untuk menjaga transparansi laporan dan membangun kepercayaan dengan masyarakat desa.

Respon kepuasan peserta terhadap program pengabdian ini juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari 20 peserta yang menjadi sampel evaluasi, 15 orang menyatakan *sangat puas* dengan materi dan metode pelatihan, sementara 5 orang menyatakan *puas*. Tidak ada peserta yang memberikan respon netral apalagi negatif. Faktor utama yang membuat peserta merasa puas adalah pendekatan pelatihan yang interaktif dan relevan dengan kebutuhan mereka. Metode andragogi yang digunakan—berbasis pada pengalaman orang dewasa—dirasakan efektif karena peserta tidak hanya menerima materi secara pasif, melainkan juga diajak untuk berdiskusi, berbagi pengalaman, dan memecahkan masalah administrasi yang mereka hadapi di BUMDes masing-masing. Hal ini membuat proses belajar menjadi lebih hidup dan bermakna. Selain itu, adanya pendampingan setelah pelatihan juga meningkatkan tingkat kepuasan, karena peserta merasa tidak ditinggalkan begitu saja setelah kegiatan selesai, melainkan terus mendapatkan arahan dalam mengimplementasikan pengetahuan baru.

Lebih lanjut, respon kepuasan peserta juga berkaitan erat dengan kebermanfaatannya nyata yang mereka rasakan. Beberapa peserta melaporkan bahwa setelah pelatihan, mereka mulai mampu menyusun laporan keuangan bulanan yang rapi dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini berdampak langsung pada meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap BUMDes, yang tercermin dari bertambahnya partisipasi warga dalam kegiatan ekonomi desa. Ada pula peserta yang mengaku lebih mudah dalam berkomunikasi dengan pemerintah desa maupun lembaga keuangan karena laporan administrasi mereka sudah lebih jelas dan terstandarisasi. Kepuasan ini tidak hanya muncul karena peserta merasa pengetahuannya bertambah, tetapi juga karena mereka melihat dampak langsung dari pelatihan terhadap peningkatan kinerja BUMDes.

Dengan demikian, kepuasan peserta tidak hanya bersifat emosional, tetapi juga rasional, berdasarkan bukti nyata dari perubahan yang terjadi di lapangan.

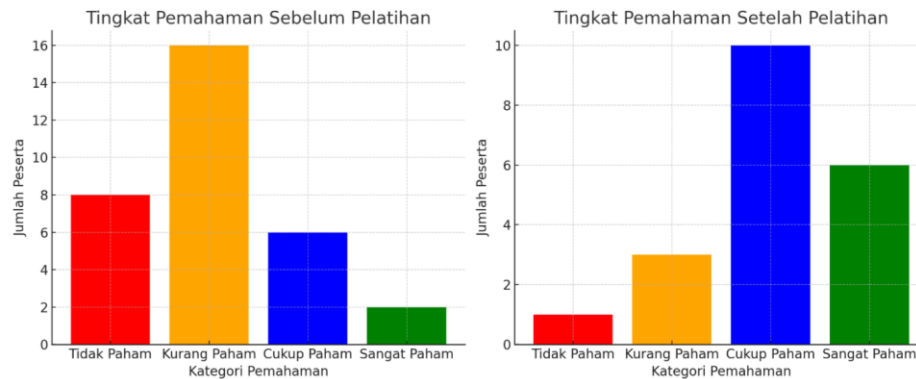
Analisis lebih dalam juga menunjukkan bahwa kepuasan peserta sangat dipengaruhi oleh kualitas fasilitator. Peserta merasa bahwa para fasilitator mampu menjelaskan materi dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami, dan sesuai dengan konteks desa. Mereka juga mengapresiasi cara fasilitator yang sabar mendampingi peserta satu per satu saat praktik penyusunan laporan. Beberapa peserta menilai bahwa pendekatan personal ini membuat mereka lebih termotivasi untuk belajar, meskipun sebelumnya merasa kesulitan dengan konsep administrasi. Dengan kata lain, keberhasilan program ini bukan hanya terletak pada materi yang relevan, tetapi juga pada kualitas interaksi antara fasilitator dan peserta yang membangun suasana belajar positif.

Selain itu, data respon kepuasan menunjukkan bahwa program pengabdian ini mampu menumbuhkan rasa memiliki terhadap hasil pelatihan. Peserta merasa bahwa format administrasi yang dihasilkan adalah karya bersama yang lahir dari diskusi dan simulasi kolektif. Hal ini membuat mereka lebih berkomitmen untuk menerapkan sistem tersebut di BUMDes masing-masing, dibandingkan jika format itu dipaksakan dari luar tanpa melibatkan mereka dalam proses penyusunan. Kepuasan ini memperlihatkan bahwa partisipasi aktif peserta dalam pelatihan bukan hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat rasa tanggung jawab terhadap keberlanjutan hasil yang dicapai.

Dari sisi kelembagaan, dampak program juga mulai terlihat. Beberapa BUMDes di Kecamatan Toroh melaporkan adanya perubahan positif setelah pelatihan, seperti meningkatnya keteraturan laporan bulanan, berkurangnya kesalahan pencatatan transaksi, dan lebih mudahnya proses audit internal. Perubahan ini tentu tidak terjadi secara instan, namun menjadi indikasi bahwa pelatihan administrasi telah memberi pengaruh nyata terhadap tata kelola organisasi. Peserta merasa puas karena melihat perubahan tersebut, dan mereka percaya bahwa dengan konsistensi dalam menerapkan sistem administrasi, BUMDes mereka akan lebih profesional, akuntabel, dan memiliki daya saing yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, analisis dampak dan kepuasan peserta menunjukkan bahwa program pengabdian ini telah berhasil mencapai tujuannya. Dampak terlihat dari meningkatnya pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional peserta, sementara kepuasan muncul karena metode pelatihan yang relevan, fasilitator yang berkualitas, serta adanya manfaat nyata yang langsung dirasakan. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya mampu mengatasi

permasalahan mitra terkait lemahnya pemahaman administrasi, tetapi juga memberikan landasan kuat bagi pengembangan kapasitas kelembagaan BUMDes ke depan. Jika model pelatihan dan pendampingan semacam ini terus dikembangkan, bukan tidak mungkin BUMDes di Kecamatan Toroh dapat menjadi percontohan bagi desa-desa lain dalam hal tata kelola administrasi yang profesional dan berdaya saing tinggi.



Grafik pertama memperlihatkan kondisi pemahaman peserta sebelum pelaksanaan program pelatihan. Dari total 32 peserta, mayoritas berada pada kategori *kurang paham administrasi* sebanyak 16 orang, dan terdapat 8 peserta yang sama sekali *tidak paham administrasi*. Hanya sebagian kecil peserta yang menunjukkan pemahaman lebih baik, yaitu 6 orang dengan kategori *cukup paham* dan 2 orang yang masuk kategori *sangat paham*. Pola ini menunjukkan bahwa tingkat literasi administrasi di kalangan pengurus BUMDes masih rendah dan belum merata, sehingga menjadi dasar utama pelaksanaan kegiatan pengabdian.

Sementara itu, grafik kedua menggambarkan kondisi setelah pelatihan dengan melibatkan 20 peserta. Hasilnya menunjukkan perubahan signifikan: mayoritas peserta beralih ke kategori *cukup paham* (10 orang) dan *sangat paham administrasi* (6 orang). Hanya tersisa 3 peserta yang masih berada pada kategori *kurang paham*, dan 1 orang pada kategori *tidak paham*. Distribusi baru ini menunjukkan adanya peningkatan nyata dalam pemahaman administrasi yang dihasilkan oleh pelatihan. Perubahan proporsi peserta menegaskan bahwa program pengabdian ini efektif dalam meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan profesionalisme pengurus BUMDes di Kecamatan Toroh.

Pembahasan

Hasil pelaksanaan kegiatan pelatihan administrasi bagi 20 pengurus BUMDes di Kecamatan Toroh memperlihatkan adanya peningkatan yang signifikan dalam aspek

pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional. Sebelum pelatihan, sebagian besar peserta berada dalam kategori *kurang paham* dan *tidak paham administrasi*, sedangkan setelah pelatihan mayoritas beralih ke kategori *cukup paham* dan *sangat paham*. Fakta ini membuktikan bahwa metode pelatihan yang berbasis praktik langsung dan pendampingan berkelanjutan mampu menjadi solusi atas kelemahan administrasi yang selama ini dihadapi oleh BUMDes.

Temuan ini sejalan dengan penelitian (Fadilah et al., 2020) yang menegaskan bahwa kelemahan mendasar BUMDes terletak pada lemahnya tata kelola administrasi dan keuangan. Penelitian tersebut menekankan perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pengelolaan BUMDes lebih profesional dan transparan. Hasil pengabdian ini memperlihatkan bahwa intervensi pelatihan terbukti efektif dalam menjawab kebutuhan tersebut, terutama ketika disertai dengan modul sederhana yang sesuai dengan konteks lokal.

Selain itu, penelitian (Kusumastuti et al., 2021) menunjukkan bahwa BUMDes yang memiliki sistem administrasi baik lebih mampu menjalankan prinsip keberlanjutan usaha desa. Perbandingan dengan hasil kegiatan ini menguatkan temuan tersebut: setelah pelatihan, peserta mengaku lebih percaya diri menyusun laporan, yang berimplikasi pada meningkatnya akuntabilitas BUMDes. Dengan demikian, program pengabdian ini tidak hanya memperbaiki pemahaman teknis, tetapi juga membangun fondasi keberlanjutan kelembagaan.

Selanjutnya, penelitian (Ridlwani, 2019) menekankan bahwa BUMDes merupakan embrio kewirausahaan sosial desa yang memerlukan penguatan administrasi agar mampu menjadi motor pembangunan ekonomi lokal. Hasil pengabdian ini memperlihatkan bahwa dengan peningkatan keterampilan administrasi, para pengurus kini mampu menyajikan laporan yang lebih transparan, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat. Hal ini konsisten dengan gagasan bahwa tata kelola yang baik merupakan kunci bagi keberhasilan BUMDes dalam menjalankan fungsi sosial-ekonomi.

Jika dibandingkan dengan penelitian (Widiastuti et al., 2021), yang menyoroti berbagai tantangan BUMDes seperti keterbatasan SDM, lemahnya manajemen, serta kurangnya inovasi, maka hasil kegiatan ini memberikan bukti bahwa salah satu tantangan utama, yakni kapasitas SDM, dapat diatasi melalui pelatihan yang sistematis. Dengan demikian, kegiatan ini berkontribusi langsung dalam memperkuat kelembagaan BUMDes melalui peningkatan kualitas pengelola.

Terakhir, penelitian (Hutomo et al., 2020) menyatakan bahwa pengembangan model BUMDes berbasis ekonomi komunitas memerlukan dukungan administratif yang kuat agar akuntabilitas keuangan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Hasil pengabdian ini sejalan dengan temuan tersebut, karena pasca pelatihan peserta melaporkan lebih mudah menyusun laporan bulanan dan mempertanggungjawabkan transaksi kepada pemangku kepentingan desa.

Dari perbandingan ini dapat disimpulkan bahwa hasil program pengabdian mendukung dan memperkuat temuan-temuan penelitian sebelumnya. Pelatihan administrasi terbukti efektif dalam menjawab kelemahan mendasar pengelolaan BUMDes, meningkatkan profesionalisme, dan memperkuat akuntabilitas kelembagaan. Hal ini sekaligus memperlihatkan bahwa program pengabdian memiliki kontribusi praktis terhadap literatur akademik yang menekankan pentingnya penguatan tata kelola administrasi sebagai fondasi keberlanjutan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Agunggunanto, E. Y., Mubarak, F. I., & Ratnawati, D. (2016). The role of BUMDes in developing village economy and empowerment. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 1–10. https://consensus.app/papers/role-bumdes-developing-village-economy-empowerment-agunggunanto/3dd38a5eb9ec52f8a589e9f33c49d2eb/?utm_source=chatgpt
- Arifin, A., & Hastuti, W. (2021). Strengthening BUMDes through digitalization in Banten. *Jurnal Pengembangan Ekonomi*, 9(2), 45–57. https://consensus.app/papers/strengthening-bumdes-development-banten-arifin/0ac1d882f6c75416940e38a1f7e68d4d/?utm_source=chatgpt
- Nuryanti, S., & Swastika, D. K. S. (2021). BUMDes strategy to improve community welfare. *Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah*, 13(1), 22–36. https://consensus.app/papers/bumdes-strategy-improve-community-welfare-nuryanti/96cd515f682452e588c3e1c808cfc2d7/?utm_source=chatgpt
- Purwana, A. A., Rahman, A., & Adi, P. (2017). The role of village-owned enterprises in developing village economy. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 20(2), 103–115. https://consensus.app/papers/role-village-owned-enterprises-developing-village-purwana/0df6a65e4cc9554c88ff4e6efba4e423/?utm_source=chatgpt
- Rahayu, D., & Putra, Y. (2020). BUMDes strengthening for village economy. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat Desa*, 5(1), 77–89. <https://consensus.app/papers/bumdes->

- strengthening-village-economy-
rahayu/69db8aa506145633ab7f86f13e1c7754/?utm_source=chatgpt
- Susanti, A., & Pratiwi, R. (2020). The role of BUMDes in increasing people's welfare. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(2), 99–110. https://consensus.app/papers/role-bumdes-efforts-increase-people-welfare-susanti/62b04a011d5c5f678aeff0e2ce89ab26/?utm_source=chatgpt
- Fadilah, N., Syahza, A., & Asmit, B. (2020). Strategy of development village-owned enterprises (BUMDes) in order to develop village economy. *International Journal of Scientific & Technology Research*, 9(3), 3222–3227. https://consensus.app/papers/strategy-development-villageowned-enterprises-bumdes-fadilah/61c56c37e8435241b8de2e5b6f052e08/?utm_source=chatgpt
- Hutomo, A. P., Sunartiningsih, A., & Rahardjo, B. (2020). Development model of BUMDes based on community economic empowerment. *International Journal of Advanced Science and Technology*, 29(5), 8299–8310. https://consensus.app/papers/development-model-bumdes-based-community-economic-hutomo/70801b5ac47a5a8c9b38f57bbf12d1a4/?utm_source=chatgpt
- Kusumastuti, W., Widiyanto, I., & Yuliana, E. (2021). The role of village-owned enterprises (BUMDes) in implementing sustainable development goals (SDGs). *Journal of Environmental Treatment Techniques*, 9(1), 96–103. https://consensus.app/papers/role-villageowned-enterprises-implementing-sustainable-kusumastuti/27095b2270385d95acaa66dbd7d4dd80/?utm_source=chatgpt
- Ridlwan, Z. (2019). BUMDes as embryo of social entrepreneurship in village. *International Journal of Business, Economics and Law*, 18(5), 36–41. https://consensus.app/papers/bumdes-embryo-social-entrepreneurship-village-ridlwan/3ee15c44eb0b5340a25a6b544072541a/?utm_source=chatgpt
- Widiastuti, N. P. E., Yasa, I. N. M., & Wulandari, A. A. P. D. (2021). Challenges of village-owned enterprises (BUMDes) in Indonesia. *Journal of Asian Finance, Economics and Business*, 8(3), 1127–1135. https://consensus.app/papers/challenges-village-owned-enterprises-indonesia-widiastuti/5c6d783d3aa4536098b1a30f03cf2236/?utm_source=chatgpt